



Forest Peoples Programme

Panduan standard
Lembaga Pendanaan Internasional (LPI)
Mei 2007

MASYARAKAT ADAT & PROYEK BANK DUNIA



**Panduan untuk Kebijakan
Bank Dunia Tentang
Masyarakat Adat (OP/BP 4.10)**



KEBIJAKAN TENTANG MASYARAKAT ADAT

Jika Pemerintah ingin menjalankan sebuah proyek di wilayah masyarakat adat yang didanai oleh Bank Dunia, maka proyek itu harus mengikuti aturan yang terdapat dalam Kebijakan Bank Dunia tentang Masyarakat Adat (OP/BP 4.10). Kebijakan tersebut mengatakan bahwa Bank Dunia tidak akan mendanai proyek yang tidak didukung oleh masyarakat adat. Peraturan tersebut menjelaskan bagaimana Pemerintah dan Bank Dunia harus merencanakan dan melaksanakan proyek yang berdampak bagi masyarakat adat dan bagaimana proyek tersebut harus mencegah, atau paling tidak mengurangi, setiap kerugian yang bisa timbul kemudian karena kehadiran proyek tersebut.

Panduan ini menjelaskan berbagai peraturan yang harus dipatuhi proyek-proyek Bank Dunia dan juga menjelaskan tentang hak masyarakat adat untuk diajak konsultasi dengan terbuka dan jujur mengenai proyek-proyek Bank Dunia, berpartisipasi dalam proyek-proyek tersebut dan menolak suatu proyek yang tidak menghormati hak-hak dan kebutuhan masyarakat adat. Panduan ini juga menjelaskan bagaimana menyampaikan kebutuhan, keprihatinan dan penolakan masyarakat adat terhadap suatu proyek kepada pemerintah dan Bank Dunia.

Adalah penting untuk memastikan masyarakat adat angkat bicara ketika proyek tengah direncanakan sebab jika akhirnya Bank Dunia sudah memutuskan untuk mendanai proyek tersebut, biasanya sudah terlambat untuk melakukan perubahan.

Kotak-kotak pada Panduan ini menjelaskan istilah-istilah resmi yang digunakan oleh Bank dalam Peraturan tersebut. Masyarakat adat, organisasi dan para pemimpin perlu memahami apa yang dimaksudkan dengan istilah-istilah tersebut, sehingga mereka

dapat berbicara kepada Bank dengan bahasa mereka sendiri dan mempunyai kesempatan lebih baik untuk didengarkan oleh Bank Dunia dan pemerintah.

Halaman 7 menjelaskan pada anda dimana mencari informasi lebih jauh, baik dari Bank maupun dari organisasi pendukung masyarakat adat.

Panduan ini juga membantu anda untuk mendiskusikan proyek yang didanai oleh lembaga lain yang memiliki peraturan yang serupa dengan Bank Dunia.

Panduan ini disusun oleh Forest People Programme (FPP) berdasarkan pemahaman FPP terhadap aturan utama bahwa Bank Dunia dan Penerima pinjaman (Pemerintah) harus mengikuti Kebijakan (Bank Dunia) tentang Masyarakat Adat.

Ada juga cara lain untuk bereaksi terhadap proyek Bank, disamping menghubungi Bank Dunia secara langsung. Pemerintah dibatasi oleh hukum nasional. Jika masyarakat adat menganggap bahwa proyek itu melanggar hukum, masyarakat bisa menempuh jalur pengadilan untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah. Jika hal itu tidak dimungkinkan, namun negara telah meratifikasi piagam dan perjanjian-perjanjian internasional tentang hak asasi manusia, maka masyarakat bisa mengadukan atau melaporkan dengan menggunakan prosedur-prosedur tersebut untuk mendapat perhatian tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan pengajuan keberatan atau permohonan tentang proyek, alangkah baiknya jika masyarakat berkonsultasi dengan organisasi masyarakat adat atau LSM pendukung di tingkat nasional atau internasional.

1 TAHAP AWAL PROYEK BANK DUNIA – PENYARINGAN

Ketika pemerintah mengusulkan suatu proyek kepada Bank Dunia, lembaga tersebut perlu menyelidiki apakah proyek yang dimaksud telah mematuhi Kebijakan Bank Dunia tentang Masyarakat Adat.

Untuk melakukan hal ini Bank Dunia harus mempelajari berbagai dokumen tentang wilayah tersebut. Dapat juga dilakukan dengan mengirimkan "konsultan/tenaga ahli" untuk mengetahui tentang masyarakat adat yang berada di wilayah tersebut. Tahap pertama disebut "penyaringan". Dalam banyak kasus, masyarakat adat baru mengetahui tentang proyek tersebut ketika konsultan datang mengunjungi mereka.

Bank Dunia dan Pemerintah harus mematuhi Kebijakan yang ada jika penyaringan menunjukkan bahwa masyarakat adat yang tinggal si sekitar dimana proyek akan dilaksanakan (disebut 'wilayah proyek'), atau jika proyek tersebut berdampak pada pemanfaatan tanah dan wilayah oleh masyarakat adat yang telah ada secara turun-temurun (disebut 'pemanfaatan kolektif') termasuk tempat-tempat yang dianggap keramat dan wilayah yang hanya gunakan pada musim-musim tertentu.



Ilustrasi diadaptasi dari "Where there is no artist" oleh Petra Rohr-Rouendaal

Apa kata kebijakan

2 HAK ANDA UNTUK TERLIBAT

Pemerintah harus berkonsultasi dengan masyarakat adat pada setiap tahapan proyek, mulai dari penyaringan sampai dengan akhir proyek. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang proyek, apa yang menurut anda perlu dilakukan dan apakah masyarakat mendukung proyek tersebut (lihat Kotak 4). Jika proyek jadi dilaksanakan, Pemerintah harus secara berkala bertanya apa pendapat masyarakat dan memberitahu tentang proyek itu dan bagaimana pelaksanaan proyek. Masyarakat mungkin beberapa kali dikunjungi oleh konsultan, petugas dari Pemerintah atau petugas Bank selama proyek berjalan.

Setiap konsultasi harus secara bebas tanpa paksaan berdasarkan informasi awal yang lengkap (free, prior and informed).

- ‘**Free**’ berarti atas kemauan sendiri masyarakat menyampaikan pendapat tanpa dipengaruhi, dibohongi atau mendapat tekanan untuk mengatakan sesuatu
- ‘**Prior**’ berarti Pemerintah wajib memberitahu sebelumnya ketika akan berkonsultasi dengan masyarakat, dan hal tersebut dilakukan sebelum keputusan dibuat, bukan sesudahnya.
- ‘**Informed**’ berarti Pemerintah secara jujur memberitahu tentang keseluruhan proyek, termasuk semua dampak baik dan buruk yang mungkin terjadi. Pemerintah harus memberi informasi dalam bahasa dan dengan cara yang dipahami sepenuhnya oleh masyarakat adat.



Konsultasi bebas tanpa paksaan berdasarkan informasi awal yang lengkap berarti pemerintah melakukan konsultasi dengan jujur dan bersungguh-sungguh dengan dilandasi niat baik. Konsultasi mesti dilakukan dengan cara-cara yang menghormati dan sesuai dengan budaya masyarakat adat, termasuk budaya dalam pengambilan keputusan(musyawarah adat)

Konsultasi bebas tanpa paksaan berdasarkan informasi awal yang lengkap maknanya lebih dari sekedar memberi informasi dan mendengar pendapat anda. Tetapi hal itu berarti bahwa masyarakat secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan tentang proyek.

Inilah yang dinamakan **keterlibatan penuh berdasarkan informasi awal yang lengkap**.



3 PENJAJAKAN SOSIAL

Pemerintah harus melakukan **Penjajakan Sosial (Social Assessment/SA)** untuk mengumpulkan informasi tentang masyarakat, setelah ‘penyaringan’ dan sebelum proyek dimulai. Pemerintah dan Bank harus memastikan bahwa masyarakat adat dan organisasi masyarakat adat ikut serta dalam ‘Penjajakan Sosial’ (lihat Kotak C).

Penjajakan Sosial harus mencatat hak-hak adat. Ini berarti hukum adat dan tradisi kepemilikan dan pemanfaatan tanah dan pemberian alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (mata pencarian) seperti tanaman, hewan, air, bebatuan dan api (sumber daya alam), demikian juga dengan kebiasaan dan praktik-praktek spiritual masyarakat adat. Penjajakan Sosial harus pula melihat sumber daya alam dan tanah yang hanya sesekali dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tujuan dari Penjajakan Sosial adalah untuk mengetahui bagaimana proyek bisa mempengaruhi masyarakat dan, dalam beberapa kasus, termasuk dampak terhadap lingkungan.

Apa kata kebijakan

4 DUKUNGAN PENUH MASYARAKAT ADAT

Penjajakan Sosial harus dilakukan melalui konsultasi bebas tanpa paksaan berdasarkan informasi awal yang lengkap. Penjajakan itu juga harus mendapat keterangan apakah masyarakat memberikan 'Dukungan Penuh' kepada proyek selama tahap perencanaan ('persiapan proyek', lihat Kotak 1-6) dan kemudian dukungan pada saat dokumen proyek dikaji ulang ('penilaian proyek', lihat Kotak 7).

Dukungan Penuh Masyarakat Adat berarti bahwa semua komponen masyarakat setuju dengan proyek dan menginginkan proyek dilaksanakan.

Jika Pemerintah tidak dapat membuktikan bahwa masyarakat adat telah memberikan Dukungan Penuh, Bank Dunia TIDAK AKAN MENDANAI proyek. Untuk mengajukan keberatan terhadap proyek, masyarakat harus menolaknya. Hanya beberapa orang menentang proyek tidaklah cukup menunjukkan bahwa tidak ada dukungan dari masyarakat.



5 RENCANA MASYARAKAT ADAT

Hanya setelah mendapatkan "Dukungan Penuh Masyarakat Adat" terhadap proyek, Pemerintah harus menyusun apa yang disebut **Rencana Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan /IPP)**.

Rencana Masyarakat Adat menjelaskan bagaimana proyek akan bekerja sama dengan masyarakat adat. Juga termasuk tindakan-tindakan yang akan dilakukan proyek untuk menghindari atau menurunkan efek merugikan pada masyarakat adat dan bagaimana masyarakat dapat mengajukan tuntutan tentang proyek jika terjadi kesalahan atau penyimpangan.

Jika masyarakat sepakat bahwa proyek dapat mengembangkan pengetahuan dan budaya masyarakat adat untuk memperoleh penghasilan, Rencana Masyarakat Adat harus menyatakan bahwa masyarakat adat telah setuju. Juga harus dijelaskan setiap kondisi yang telah masyarakat adat siapkan untuk mendapat manfaat dari proyek terhadap budaya dan pengetahuan.

Rencana Masyarakat Adat juga harus berisi **Rencana-rencana Aksi** yang menjelaskan bagaimana proyek akan memberi manfaat sosial dan ekonomi, dengan cara yang sesuai dengan budaya masyarakat.

Jika proyek ingin membangun jalan, saluran pipa, bendungan, jaringan listrik atau bangunan jangka panjang lainnya di tanah masyarakat, Bank Dunia mengatakan bahwa Pemerintah secara resmi harus mengakui bahwa proyek itu memakai tanah masyarakat, dan secara hukum mencatatkan tanah adat tersebut. Rencana Masyarakat Adat harus mencakup Rencana Aksi untuk mendapat pengakuan hukum tersebut.

Pada proyek yang bukan merupakan bangunan jangka panjang namun proyek itu sedikit banyak bisa berpengaruh terhadap tanah-tanah adat, masyarakat bisa memutuskan untuk memberikan Dukungan Masyarakat Luas hanya bila Pemerintah secara hukum mengakui tanah adat. Pada kasus seperti ini, Rencana Masyarakat Adat sekali lagi harus mencantumkan Rencana Aksi mengenai hal ini.

Rencana Masyarakat Adat juga harus berisi anggaran dan kerangka waktu untuk kegiatan yang dimaksudkan memberi keuntungan kepada komunitas adat.

6 PERLINDUNGAN TERHADAP PEMINDAHAN PAKSA

Dibawah aturan Bank Dunia, Pemerintah tidak bisa memindahkan masyarakat (pindah ke tempat lain), kecuali bila masyarakat telah memberikan Dukungan Penuh Masyarakat untuk mau dipindahkan.

KAWASAN LINDUNG

Jika proyek menyangkut taman nasional atau kawasan lindung lainnya, proyek mesti menghindari tindakan-tindakan yang merubah atau membatasi masyarakat dalam memanfaatkan kawasan tersebut, kecuali jika masyarakat telah setuju dengan hal tersebut, setelah melalui konsultasi bebas tanpa paksaan berdasarkan informasi awal yang lengkap dan memberi Dukungan Penuh Masyarakat.

Bank Dunia menyatakan mungkin terdapat beberapa 'pengecualian' jika proyek akan mengurangi atau menghentikan pemanfaatan masyarakat adat atas taman nasional atau kawasan lindung. Pada kasus seperti ini Pemerintah harus membuat dokumen yang dinamakan **Kerangka Kerja Proses (Process Framework)** yang menyatakan bagaimana Pemerintah akan mematuhi Kebijakan Bank lainnya yakni "Kebijakan Bank Dunia mengenai Pemindahan Paksa" (disebut OP 4.12) dan mendapatkan Dukungan Penuh Masyarakat Adat.

Apa kata kebijakan

7 MENILAI DAN MENYETUJUI PROYEK

Pada tahap ini, Pemerintah harus memberi Laporan Penjajakan Sosial, draf Rencana Masyarakat Adat dan draf Kerangka Kerja Proyek kepada masyarakat adat. Dokumen harus diberikan dalam bahasa dan bentuk yang tepat sehingga masyarakat adat dapat memahaminya.

Bank Dunia mengunjungi Negara tersebut dan menilai (memeriksa) seluruh informasi tentang proyek, termasuk hasil dari konsultasi dengan masyarakat adat. Jika tidak suka dengan proyek maka masyarakat harus berusaha menemui tim penilai Bank Dunia selama kunjungan tersebut.

Bank memperbarui Dokumen Identifikasi Proyek (lihat Kotak 9) dan memastikan bahwa Pemerintah menyelesaikan Rencana Masyarakat Adat sesuai dengan peraturan Bank dalam Kebijakan. Bank melakukan tiap Penjajakan Lingkungan yang terbuka terhadap publik. Jika Bank tidak punya bukti bahwa masyarakat telah memberikan Dukungan Penuh Masyarakat Adat, penilaian proyek dihentikan.

Bila ada Dukungan Penuh Masyarakat Adat, Bank membuat **Dokumen Penilaian Proyek (PAD)**, yang menjelaskan bagaimana proyek sesuai dengan Kebijakan Bank tentang Masyarakat Adat. Bank tidak mempublikasikan Dokumen Penilaian Proyek HINGGA ada persetujuan proyek.

Bank dan Pemerintah menegosiasi jumlah dan syarat-syarat pinjaman. Dewan Direktur Bank menyetujui kesepakatan hukum pelaksanaan pinjaman.

8 MELAKSANAKAN PROYEK

Pemerintah harus memberikan Dokumen Persetujuan Proyek kepada masyarakat adat dan dokumen-dokumen proyek final dalam bahasa dan bentuk yang menghormati budaya masyarakat adat, dan di tempat yang mudah diperoleh.

Pemerintah harus mengatur sistem pengajuan keberatan terhadap proyek. Sistem tersebut harus memantau bagaimana proyek dilaksanakan dan melibatkan masyarakat adat, dengan melakukan konsultasi tanpa paksaan berdasarkan informasi awal yang lengkap.

Bank harus memastikan bahwa Pemerintah melaksanakan proyek sesuai dengan kesepakatan hukum dari pinjaman tersebut.

9 MEMAHAMI BAHASA BANK DUNIA

Kebijakan Bank Dunia menggunakan istilah-istilah tertentu untuk menjelaskan makna dalam peraturan mereka ('definisi'). Masyarakat adat, organisasi dan para pemimpin harus terbiasa dengan arti istilah-istilah tersebut untuk bisa memastikan Bank dan Pemerintah mendengarkan anda.

Panduan ini telah menjelaskan beberapa syarat-syarat kebijakan kunci:

Konsultasi tanpa paksaan berdasarkan informasi awal yang lengkap – lihat Kotak 2

Dukungan Penuh Masyarakat Adat – lihat Kotak 4

Keterlibatan penuh berdasarkan informasi awal yang lengkap (informed participation) – lihat Kotak 2

Pemanfaatan Kolektif – lihat Kotak 1

Kata-kata penting lain yang akan dipakai Bank dan yang perlu anda pahami adalah:

➤ Dokumen Informasi Proyek (DIP): Dokumen singkat yang diterbitkan Bank Dunia yang menjelaskan tujuan proyek, biaya dan jika atau bagaimana masyarakat adat dan isu sosial lainnya akan ditangani oleh proyek. Dokumen ini harus mudah diperoleh publik setelah melalui penyaringan proyek.

➤ Integrated Safeguards Data Sheet (ISDS): Lembar yang singkat namun penting yang diterbitkan serupa dengan DIP (lihat di atas). Memuat aturan Bank Dunia mana saja yang harus dipatuhi dalam proyek dan mencatat apakah Bank berpendapat bahwa Kebijakan Masyarakat Adat harus diterapkan. Anda bisa tidak sepakat dengan keputusan Bank dalam ISDS tentang apakah proyek tersebut menguntungkan atau merugikan masyarakat anda.

➤ Penilaian Proyek: Bagian akhir dari persiapan proyek adalah ketika Bank Dunia mengumpulkan seluruh laporan dan informasi yang dihimpun oleh pemerintah, konsultan dan oleh Bank sendiri. Pada tahap ini, Bank memutuskan apakah proyek telah mengikuti seluruh aturan Bank sebagaimana mestinya, termasuk Kebijakan tentang Masyarakat Adat, dan apakah Bank akan mendanai proyek itu atau tidak. Bank mungkin akan mengirimkan petugas mereka ke negara dan ke daerah tersebut selama tahap penilaian untuk menyelidiki informasi dan memastikan setiap kesepakatan yang ada sudah benar dan sah. Anda harus bertanya kepada Bank Dunia kapan penilaian proyek diselenggarakan, sebab ini merupakan kesempatan terakhir masyarakat untuk membuat pandangannya diketahui.

➤ Dokumen Penilaian Proyek (PAD): Dokumen besar yang menjelaskan tentang proyek, anggaran dan bagaimana masalah-masalah masyarakat adat ditangani. Dokumen harus memuat kesimpulan dari Penjajakan Sosial, Rencana Masyarakat Adat yang sudah final serta studi lain dan rencana-rencana lain sebagai lampiran, termasuk rekaman proses dari konsultasi tanpa paksaan berdasarkan informasi awal yang lengkap dan apa pendapat masyarakat adat tentang proyek. Dokumen dikirimkan kepada pimpinan Bank Dunia (Direktur Pelaksana) yang memutuskan apakah menerima proyek, menolak atau meminta perubahan lebih lanjut. Secara resmi, PAD final hanya disampaikan kepada publik jika pimpinan Bank mengatakan akan meminjamkan uang untuk proyek (ini dilakukan setelah persetujuan proyek).

➤ Kerangka kerja Proses: Ini merupakan rencana umum singkat untuk menangani masalah-masalah masyarakat adat dan masalah-masalah sosial lainnya selama pelaksanaan proyek (setelah proyek dimulai). Ini diperlukan ketika proyek dilaksanakan di kawasan konservasi dan kawasan lindung. Bank Dunia harus memastikan bahwa masyarakat ikut terlibat mengembangakannya.

➤ Persetujuan Pinjaman: Kesepakatan hukum antara Bank Dunia dan Pemerintah tentang bagaimana proyek harus dijalankan, termasuk langkah-langkah untuk melindungi atau menguntungkan masyarakat adat. Kadang-kadang kesepakatan ini bersifat rahasia, namun tidak selalu demikian. Masyarakat Adat dapat meminta salinan kesepakatan ini dari Pemerintah.

➤ Ketua Tim Kerja: Seorang petugas dari Bank Dunia yang bertanggung jawab pada suatu proyek Bank. Orang ini mungkin berkedudukan di kantor pusat Bank atau di salah satu kantor Bank di suatu negara di wilayah anda. Dokumen PID harus berisi cara berhubungan dengan petugas tersebut.

AKSI MASYARAKAT

A MENDAPATKAN INFORMASI TENTANG SEBUAH PROYEK

- Mintalah bantuan kepada masyarakat adat lain, Organisasi-organisasi Masyarakat Adat atau LSM-LSM pendukung. (Lihat halaman 7 untuk menghubungi).
- Dapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang proyek dari kantor Bank Dunia di negara anda, organisasi masyarakat adat dan LSM.
- Mintalah salinan ‘Dokumen Informasi Proyek’ (PID) dan Integrated Safeguards Data Sheet kepada Bank. Dokumen tersebut menjelaskan tujuan proyek, kerangka waktunya dan bagaimana menghubungi orang yang bertanggung jawab dari Bank ('Task Manager' atau 'Ketua Tim Kerja'). Lihat halaman 7 bagaimana cara memperoleh dokumen tersebut melalui internet. Jika kantor Bank Dunia di negara anda tidak menyediakannya, mintalah kepada Pemerintah.

Jika anda tidak mendapatkan informasi, anda harus mengajukan keberatan kepada Unit untuk Masyarakat Adat di kantor pusat Bank (lihat halaman 7).

- Apakah dokumen-dokumen tersebut mencatat dengan benar tentang masyarakat, dan seluruh komunitas, serta tanah-tanah masyarakat adat dan sumber daya alam yang dapat terkena dampak proyek?
- Mulailah membahas proyek dengan anggota komunitas.

Apakah anda akan mengikuti pertemuan komunitas mengenai jaringan pipanisasi yang akan dibangun pemerintah di tanah kita?



Konsultasi Pemerintah



B KONSULTASI PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT ADAT

- Apakah Pemerintah telah memberi tahu masyarakat adat tentang konsultasi pada saat yang tepat, dan menyiapkan masyarakat untuk terlibat?
- Apakah sudah termasuk para pemimpin masyarakat adat, para tetua, perempuan adat dan kelompok masyarakat lainnya?
- Apakah masyarakat mendapat cukup penjelasan dalam bahasa yang tepat sehingga dapat memahami proyek ini?
- Apakah masyarakat diberi tahu mengenai hal-hal buruk dan hal-hal baik yang dapat terjadi dalam proyek ini?
- Apakah konsultasi menghormati budaya masyarakat adat dan cara-cara tradisional dalam pengambilan keputusan sebagai sebuah komunitas?
- Apakah konsultasi menggali pendapat seluruh masyarakat, bukan hanya dari beberapa individu?
- Apakah anggota masyarakat membicarakan tentang hal apa yang paling penting dan kekhawatiran mereka terhadap proyek, dan apakah konsultasi mencatat hal-hal tersebut?
- Apakah seluruh pertanyaan-pertanyaan masyarakat adat dijawab sebagaimana mestinya? Apakah masyarakat puas dengan informasi yang diterima?
- Apakah masyarakat berpendapat bahwa Pemerintah berkonsultasi secara jujur dan hormat?
- Apakah konsultasi memberi kesempatan masyarakat, dan para pemimpin serta organisasi yang berbicara mewakili masyarakat adat, untuk mengambil keputusan tentang proyek dan mengubah bagaimana proyek mesti direncanakan dan dilaksanakan?

Jika anda berpendapat bahwa ada konsultasi yang tidak dilakukan sebagaimana seharusnya seperti pada Kotak 2, atau bahwa hak masyarakat adat untuk terlibat penuh tidak dihormati, tulislah surat kepada Task Manager proyek dari Bank Dunia, dan kirimkan salinan surat kepada Unit untuk Masyarakat Adat pada Bank (lihat alamat di halaman 7).

ABC apa yang bisa anda lakukan



C TERLIBAT DALAM PENJAJAKAN SOSIAL

- Bagaimana proyek akan berpengaruh pada hak-hak atas tanah dan sumber daya alam, penghidupan dan praktik spiritual masyarakat adat?
- Gerakkan masyarakat untuk mendiskusikan proyek. Apakah Pemerintah mengikuti semua aturan yang tercantum dalam Kebijakan tentang Masyarakat Adat, dan akankah proyek benar-benar akan menghormati 'pemanfaatan kolektif' masyarakat adat atas tanah sumber daya alam (lihat Kotak 1)
- Jika menurut masyarakat adat proyek bisa merusak, sampaikan kepada para konsultan yang melakukan Penjajakan Sosial bagaimana dan mengapa proyek bisa merugikan bagi masyarakat adat.

Tuliskan apa ingin disampaikan, atau mintalah seseorang untuk membantu menuliskannya. Kirimkan pernyataan tertulis tersebut kepada kantor Bank Dunia di negara anda, dengan salinannya kepada pimpinan Bank Dunia di Amerika Serikat (lihat alamat di halaman 7).



INGAT !

Simpanlah salinan tertulis yang bertanggall dari semua yang disampaikan kepada Bank, mengantisipasi kemungkinan jika masyarakat harus membuktikannya di kemudian hari.

D MERESPON PROYEK

- Jika masyarakat adat memutuskan tidak menghendaki proyek tersebut, katakan kepada para konsultan dan kirimkan salinan pernyataan tertulis terhadap proyek kepada Task Manager Bank Dunia. Jika memungkinkan, ajak orang luar atau organisasi yang dipercayai untuk menjadi saksi keputusan tersebut. Bank Dunia tidak akan mendanai proyek jika mereka menerima bukti jelas bahwa masyarakat adat menolaknya.
- Jika masyarakat adat berpendapat bahwa proyek tersebut baik, mintalah konsultan untuk menjelaskan apa yang akan dituliskan dalam laporan mereka, termasuk kesepakatan apapun yang telah mereka buat dengan masyarakat tentang apa yang akan dikerjakan proyek.
- Jika masih tetap khawatir tentang beberapa aspek dari proyek tersebut, katakan kapada konsultan bagaimana proyek harus dirubah sebelum masyarakat adat memberi dukungan. Bersikaplah percaya diri dan terangkan dengan jelas kepada konsultan bahwa masyarakat adat punya cara tersendiri dalam pengambilan keputusan yang harus dihormati oleh Pemerintah dan Bank.
- Jika masyarakat adat menerima proyek tersebut, katakan kepada konsultan bahwa masyarakat akan mempertegas dukungan HANYA setelah melihat seluruh dokumen akhir proyek dan telah memastikan bahwa Pemerintah, secara tertulis, sepakat untuk bersungguh-sungguh menghormati hak-hak dan kepentingan masyarakat adat dan telah mengatur perlindungan dan keuntungan yang akan diberikan proyek kepada masyarakat adat.

Jangan sekali-kali menandatangani dokumen untuk memberikan Dukungan Penuh Masyarakat sebelum mempelajari dan memahami dokumen proyek final. Anda bisa melihatnya di dokument-dokumen tersebut pada tahap Persetujuan proyek (lihat Kotak 7).

AKSI MASYARAKAT

E MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP RENCANA MASYARAKAT ADAT

- Dapatkan informasi dari konsultan atau ORNOP pendukung kapan Pemerintah akan berkonsultasi dengan masyarakat tentang Rencana Masyarakat Adat, dan bagaimana hal itu dirancang bagi partisipasi penuh berdasarkan informasi awal yang lengkap selama masa persiapan dan pelaksanaan.
- Gerakkan masyarakat adat untuk memutuskan apa yang masyarakat ingin proyek lakukan bagi mereka, baik untuk menghindari kerugian maupun untuk mendapatkan manfaat. Jika memungkinkan cari tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Apakah Pemerintah telah melaksanakan sesuai prosedur yang benar (lihat Kotak 2) ketika melakukan konsultasi dengan masyarakat tentang Rencana Masyarakat Adat? Akankan masyarakat dilibatkan dalam merencanakan dan melaksanakan Rencana tersebut?
- Mintalah konsultan untuk memberitahu apa yang akan mereka tuliskan dalam Rencana Masyarakat Adat. Apakah masyarakat adat puas bahwa Rencana itu akan memperlakukan hal-hal yang terpenting bagi masyarakat adat secara tepat?



Tuliskan apa yang dikatakan masyarakat, dan apa yang dikatakan konsultan. Jika tidak mampu menuliskannya, mintalah bantuan seseorang untuk melakukannya.



F PERLINDUNGAN DARI PEMINDAHAN PAKSA

- Apakah Pemerintah menggunakan prosedur yang benar sesuai dengan Kotak 2 untuk melakukan konsultasi penuh tanpa paksaan berdasarkan informasi awal yang lengkap?
- Ikuti panduan pada Kotak D tentang menerima atau menolak rencana Pemerintah.
- Apakah konsultasi mencatat setiap keberatan dari masyarakat adat untuk relokasi/pemindahan atau perubahan manfaat kawasan dilindungi oleh masyarakat adat?
- Jika ada kemungkinan masyarakat setuju untuk dipindahkan atau mengubah cara mereka memanfaatkan kawasan lindung, pastikan konsultan telah mencatat tuntutan alternatif atau kompensasi atas hilangnya tanah, sumber daya alam, mata pencaharian dan praktik spiritual mereka.

Ingat: dalam proyek Bank Dunia, Pemerintah tidak bisa memaksa masyarakat adat untuk pergi dari tanah tersebut atau mengubah pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat.

ABC apa yang bisa anda lakukan



Pastikan
bahwa anda memeriksa
kebenaran semua dokumen proyek.
Jika ada yang salah, beritahu secara
tertulis kepada Bank Dunia.

G

PENILAIAN DAN PERSETUJUAN ROYEK

- Kirimkan surat kepada Bank untuk mengetahui kapan tim Penilai dari Bank akan mengunjungi negara anda. Mintalah tim untuk bertemu dengan para pemimpin dan kelompok yang mewakili suara masyarakat adat. Usahakan menghadirkan pengamat pada pertemuan tersebut sebagai saksi diskusi.
- Sudahkah anda menerima dokumen proyek dalam bahasa yang tepat dan dengan cara yang bisa dipahami?
- Mintalah salinan keseluruhan draf Dokumen Penilaian Proyek dan Penjajakan Sosial. Bank tidak harus memberikan dokumen yang diminta tersebut, namun tidak ada salahnya dicoba.
- Pastikan anda mendapatkan salinan Dokumen Identifikasi Proyek yang terbaru serta dokumen Amdal. Apakah masyarakat setuju dengan isi dokumen tersebut?
- Apakah laporan Penjajakan Sosial telah dengan tepat menjelaskan keberadaan masyarakat adat, hak-hak nya, serta tanah dan sumber daya? Apakah laporan itu mencantumkan pendapat masyarakat bagaimana proyek akan berpengaruh terhadap mereka?
- Jika Pemerintah telah membuat kesepakatan tentang proyek dengan masyarakat adat, apakah dokumen yang ada telah mencatatnya dengan benar, termasuk pula kekhawatiran dan keberatan masyarakat terhadap proyek?
- Apakah masyarakat setuju dengan rancangan dan Rencana Masyarakat Adat yang telah final, terutama tujuan, cara monitoring proyek, rencana aksi, sistem pengajuan keberatan, anggaran dan kontrak bagi siapa yang akan melaksanakan pekerjaan (rencana implementasi)?.
- Apakah masyarakat setuju dengan draf Poses rencana Kerangka kerja untuk masyarakat dan kawasan lindung?

Jika anda tidak setuju dengan dokumen atau mereka tidak menyatakan dengan jelas bagaimana proyek akan menghormati hak-hak masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka, kirimlah surat kepada Bank Dunia untuk mengatakan bahwa masyarakat tidak mendukung proyek seperti itu, dan meminta diadakan perubahan. Mintalah Bank untuk menyediakan bukti tertulis bagaimana mereka memenuhi permintaan anda.

Jika anda tidak puas dengan jawaban Bank, kirimi lagi mereka surat yang menyatakan keberatan masyarakat sehingga surat tersebut dapat dipresentasikan kepada Dewan Bank sebelum proyek disetujui.

- Bila anda masih merasa keberatan terhadap proyek, mintalah bertemu dengan country's representative (wakil Bank di setiap negara) di Dewan Direksi Bank sebelum Dewan melakukan pertemuan untuk menyetujui pinjaman.

H

MENJALANKAN PROYEK

- Apakah masyarakat menerima dokumen-dokumen proyek dengan segera?
- Apakah masyarakat adat terlibat penuh dalam proyek melalui konsultasi penuh tanpa paksaan berdasarkan informasi awal yang memadai? Apakah anda memperoleh informasi secara berkala tentang bagaimana proyek dijalankan, bagaimana anggaran digunakan, dan rencana aksi yang telah disetujui?
- Apakah Pemerintah menghormati kesepakatan dengan masyarakat secara jujur?
- Apakah masyarakat memahami sistem pengajuan keluhan terhadap proyek? Apakah mudah bagi masyarakat menggunakan sistem tersebut dan apakah mereka merespon dengan segera?

- Mintalah salinan laporan monitoring proyek, dan pastikan laporan itu mencatat setiap masalah yang masyarakat kemukakan.
- Mintalah salinan Rencana Operasional Tahunan Bank untuk mengetahui rencana Pemerintah untuk proyek setiap tahun dan anggaran bagi masing-masing kegiatan.
- Bila masih terdapat permasalahan mengenai proyek atau Pemerintah tidak menghormati dokumen proyek, tulislah surat kepada Task Manager Proyek Bank. Masyarakat juga bisa minta bantuan Komnas HAM, Organisasi-organisasi perlindungan masyarakat serta LSM nasional dan internasional.
- Badan Pemerintah pelaksana proyek dibatasi oleh hukum negara. Jika ini dilanggar oleh proyek, masyarakat bisa menggunakan pengadilan negeri untuk mengajukan proses menghentikan atau mengubah proyek. Lakukan konsultasi dengan organisasi masyarakat adat atau LSM pendukung untuk meminta pertimbangan.
- Anda mungkin juga mengajukan keberatan secara formal kepada Panel Inspeksi Bank Dunia. Panel itu sendiri memang tidak dapat menyelesaikan masalah, namun Panel bisa membuktikan kepada puncak pimpinan Bank bahwa yang anda keluhkan memang benar.

UNTUK BANTUAN & INFORMASI LEBIH LANJUT

DARI BANK DUNIA

Di negara anda

Banyak negara memiliki kantor Bank Dunia di Ibu Kota negara. Untuk mengetahui apakah di negara anda terdapat kantor Bank Dunia, anda bisa mencarinya di website:

<http://www.worldbank.org/countries>

Dengan mengikuti alamat diatas anda bisa mengakses situs untuk negara anda (jika ada). Situs negara memiliki laporan, dokumen-dokumen proyek dan penelitian tentang negara itu. Beberapa dokumen tidak boleh dibaca oleh publik dan tidak tersedia dalam situs. Untuk proyek-proyek yang belum dimulai (masih dalam persiapan), cari di 'projects and programs' dan pilih 'proposed projects', lalu klik nama proyek, yang akan membawa ke halaman Project Information Document (PID) dan dokumen lain yang berkaitan.

Situs negara Bank Dunia juga memberi tahu alamat kantor yang dapat hubungi secara langsung. Pilih nama negara, lalu pilih 'contact us/get involved'.

Kantor Pusat Bank Dunia

Jika anda menghendaki informasi tentang proyek di negara anda, biasanya akan lebih berhasil bila menghubungi kantor negara. Namun bisa juga dengan mengirim langsung email atau surat ke Koordinator untuk Masyarakat Adat di kantor pusat Bank Dunia, di Washington DC, AS, dengan alamat di bawah ini. Jangan Lupa membuat salinan setiap email atau surat yang dikirimk selama perencanaan dan penilaian proyek kepada kantor negara dan kantor pusat.

Fax: +1 202 477 0565
Email: indigenouspeoples@worldbank.org
Pos: World Bank
Mail Stop Number MC5-523
1818 H Street, NW
Washington, D. C. 20433 USA

Anda bisa mendapatkan salinan kedua dokumen yang berasal dari kebijakan tentang Masyarakat Adat di website Bank Dunia atau dengan mengirim surat ke Bank. Dokumen tersebut adalah:

Operational Procedure 4.10: Indigenous Peoples
Bank Procedure 4.10: Indigenous Peoples.

Dokumen tersebut tersedia dalam bahasa Bengali, Hindi, Inggris, Perancis, Spanyol dan Vietnam.

<http://go.worldbank.org/1Y5C9H1Q50>

ORNOP DAN ORGANISASI PENDUKUNG

Di negara anda

Di beberapa negara juga terdapat LSM/ORNOP yang telah bekerja mengenai isu-isu yang berhubungan dengan proyek-proyek Bank Dunia atau yang menghadapi persoalan dengan proyek-proyek Bank Dunia di masa lalu. Sebaiknya menghubungi LSM yang berpengalaman dengan Bank Dunia di negara anda untuk mendapat saran dan bantuan.

Dukungan internasional

Forest Peoples Programme (FPP) merupakan LSM yang mendukung hak-hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri dan untuk menentang proyek-proyek yang bersifat top-down dari badan internasional seperti bank Dunia. FPP dapat memberi saran mengenai peraturan Bank Dunia dan pilihan bagi masyarakat adat untuk merespon proyek Bank Dunia, termasuk bagaimana menempuh jalur hukum dalam hubungannya dengan peran pemerintah dalam suatu proyek.

Website FPP adalah: <http://www.forestpeoples.org>

Tel: +44 1608 652893
Fax: +44 1608 652878
Email: info@forestpeoples.org
Pos: FPP, 1c Fosseway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh, GLOS. GL56 9NQ, UK

The **Bank Information Center (BIC)** merupakan LSM yang bekerja bersama masyarakat sipil di negara berkembang untuk mempengaruhi Bank Dunia dan lembaga pendanaan internasional lainnya untuk mengembangkan keadilan ekonomi dan sosial serta kelestarian lingkungan. Website BIC berisi banyak informasi tentang proyek-proyek Bank Dunia yang tengah direncanakan atau sedang dilaksanakan di seluruh dunia.

Website BIC adalah: <http://www.bicusa.org>

Tel: +1 202 737 7752
Fax: +1 202 737 1155
Email: info@bicusa.org
Pos: BIC, 1100 H Street, NW, Suite 650
Washington, D.C. 20005, USA

BIC juga mempunyai alamat orang-orang yang bisa dihubungi di beberapa lembaga pendanaan internasional. Pada website BIC, cari negara anda di <http://www.bicusa.org/en/Regions>

Situs BIC akan menunjukkan orang-orang paling penting yang bisa dihubungi untuk Bank Dunia, serta lembaga pendanaan lainnya seperti Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia), the Inter-American Development Bank dan African Development Bank.

The **International Accountability Project (IAP)** adalah Ornop internasional yang memberi saran kepada masyarakat adat dan komunitas lokal tentang bagaimana cara mengajukan keberatan tentang lembaga pendanaan internasional dan badan bantuan, termasuk Bank Dunia.

Website IAP adalah: <http://www.accountabilityproject.org>

Tel: +1 510 759 4440
Pos: IAP, 657 Mission Street, Suite 500
San Francisco, CA 94105, USA

CATATAN

PENTING

Pastikan bahwa untuk mendapatkan salinan lengkap dokumen kebijakan Bank Dunia tentang Masyarakat Adat:

OP4.10 and BP 4.10 beserta lampirannya.

Jika menganggap bahwa proyek yang didanai Bank Dunia kemungkinan mempengaruhi masyarakat adat dan wilayahnya, sebaiknya mendapatkan salinan lengkap kebijakan Bank Dunia. Kedua dokumen tersebut adalah: the Operational Policy 4.10 on Indigenous Peoples and the Bank Procedure 4.10 on Indigenous Peoples.

Dokumen berikut ini tersedia di internet:

<http://go.worldbank.org/1Y5C9H1Q50>



Forest Peoples Programme
1c Fosseway Centre, Moreton-in-Marsh, GL56 9NQ, UK
tel: +44 1608 652893 fax: +44 1608 652878
info@forestpeoples.org www.forestpeoples.org